

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Tingkat Pengangguran
 - 1.3 Tingkat Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Ekonomi Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertambangan)
 - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
 - 3.3 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
 - 3.4 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.5 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

Perkembangan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

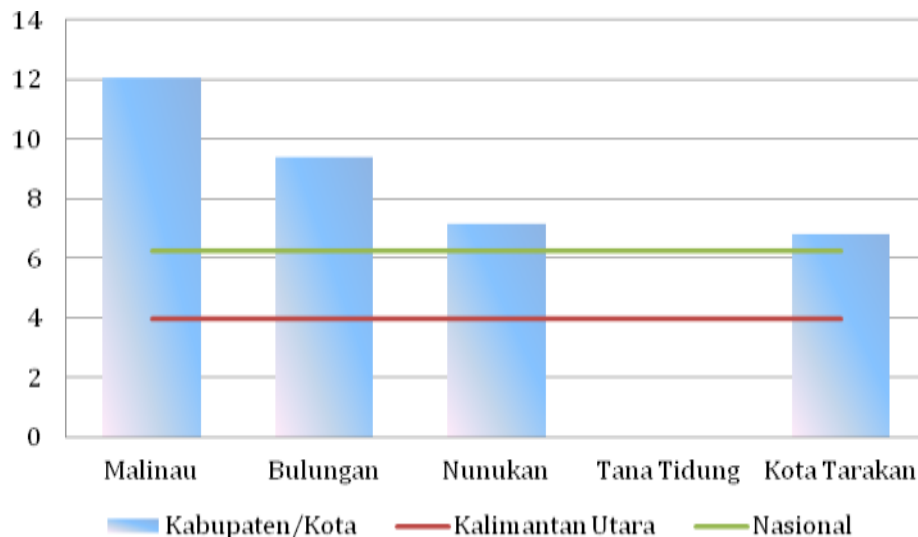
A. Perkembangan Indikator Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Kalimantan Utara yang telah menjadi daerah otonomi baru sejak 25 Oktober 2012 memiliki potensi sumberdaya alam yang besar, diantaranya kehutanan, hasil laut, sumberdaya mineral, pertanian, dan perkebunan. Selama periode 2012-2013 kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Utara secara umum relatif baik. Sebagai provinsi baru, pada akhir tahun 2012 perekonomian Kalimantan Utara tumbuh sebesar 3,95 persen, sedikit lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 3,98 persen (Kalimantan Utara Dalam Angka, 2013). Laju pertumbuhan ekonomi daerah masih berada di bawah laju pertumbuhan nasional sebesar 6,23 persen pada tahun 2012 dan 5,90 persen pada tahun 2013 (Gambar1).

Gambar 1

Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2000 Kalimantan Utara Tahun 2012

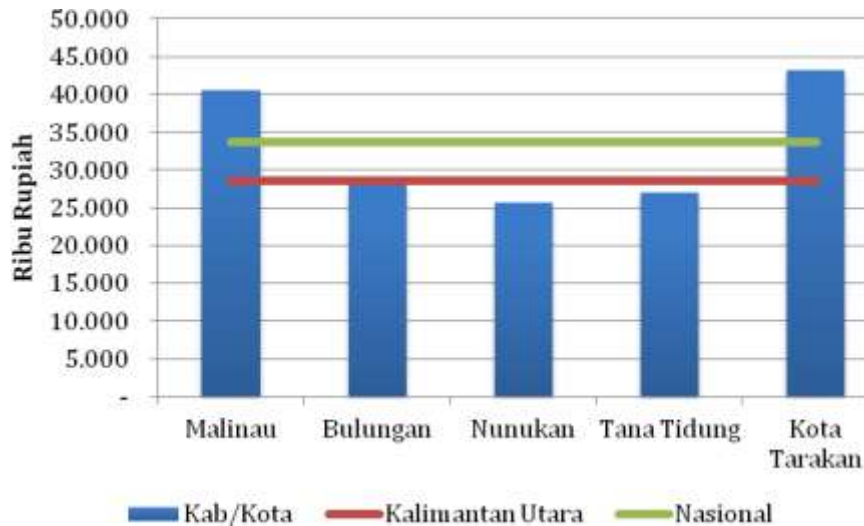


Sumber: BPS (2013), Kalimantan Utara dalam Angka (2013)

Rasio PDRB per kapita antara Kalimantan Utara dan nasional pada tahun 2012 sebesar 84,76 persen (Gambar 2). Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi induk, PDRB per kapita di Kalimantan Utara tertinggal cukup jauh. Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara bertujuan untuk mendorong peningkatan

pelayanan terutama di kawasan perbatasan dan fokus pada peningkatan perekonomian masyarakat Kalimantan Utara yang berada di dekat perbatasan dan negara tetangga.

Gambar 2
PDRB Per Kapita ADHB Kalimantan Utara Tahun 2012

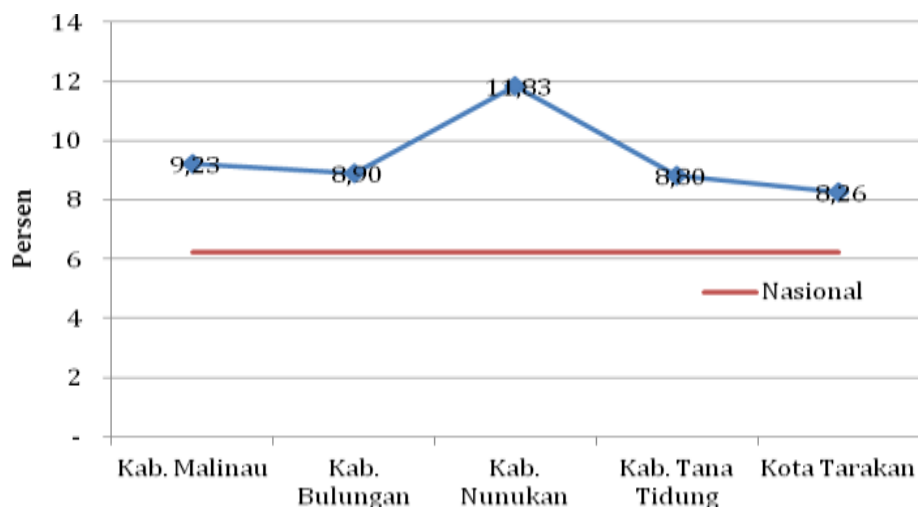


Sumber: BPS (2013), Kalimantan Utara dalam Angka (2013)

2. Tingkat Pengangguran

Gambaran secara umum tingkat pengangguran Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012 berada di atas nasional. Kabupaten dan kota di Kalimantan Utara memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tinggi di atas 8 persen, sementara angka TPT nasional sebesar 6,24 persen (Gambar 3). Lemahnya pengembangan aktivitas ekonomi yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran di Kalimantan Utara.

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2012

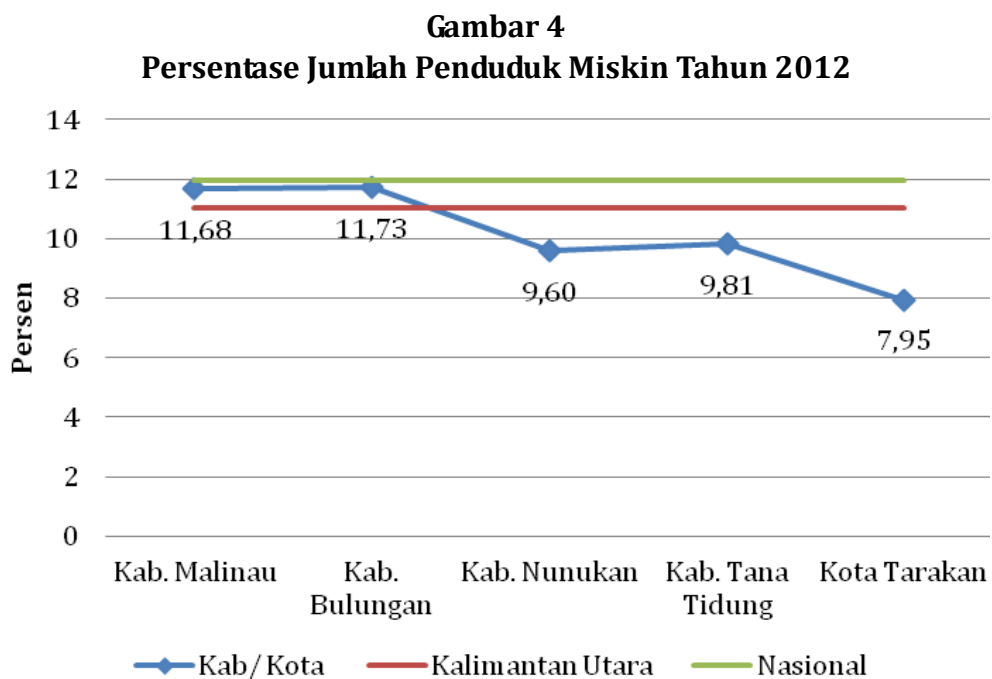


Sumber: BPS, 2013

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang rendah disertai dengan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi daerah belum mampu menyerap tenaga kerja lebih besar, serta terbatasnya nilai tambah yang diciptakan perekonomian daerah. Tantangan yang harus dihadapi adalah peningkatan produktivitas sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang relatif tinggi.

3. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara berada sedikit di bawah nasional. Pada tahun 2012 tingkat kemiskinan di Kalimantan Utara sebesar 11,01 persen, sementara secara nasional tingkat kemiskinan sebesar 11,96 persen (Gambar 4). Persentase penduduk miskin di perkotaan relatif lebih rendah daripada di perdesaan, yang menunjukkan pembangunan belum dinikmati secara merata di Kalimantan Utara.



Sumber: BPS (2013), Kalimantan Utara dalam Angka (2013)

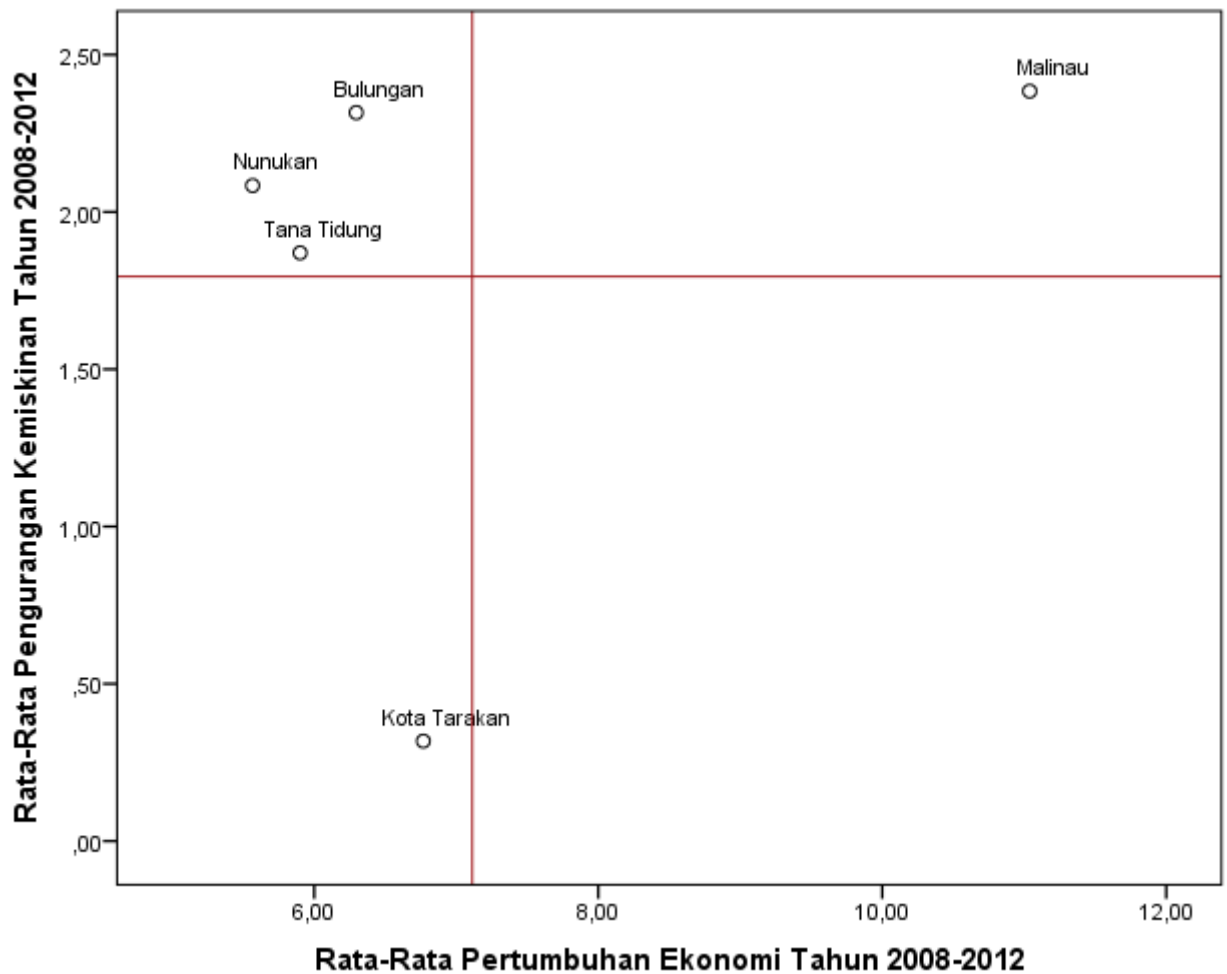
B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebelum dan sesudah mengalami pemekaran, dengan penjelasan sebagai berikut.

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin
Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pertama, Kabupaten Malinau memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Kedua, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

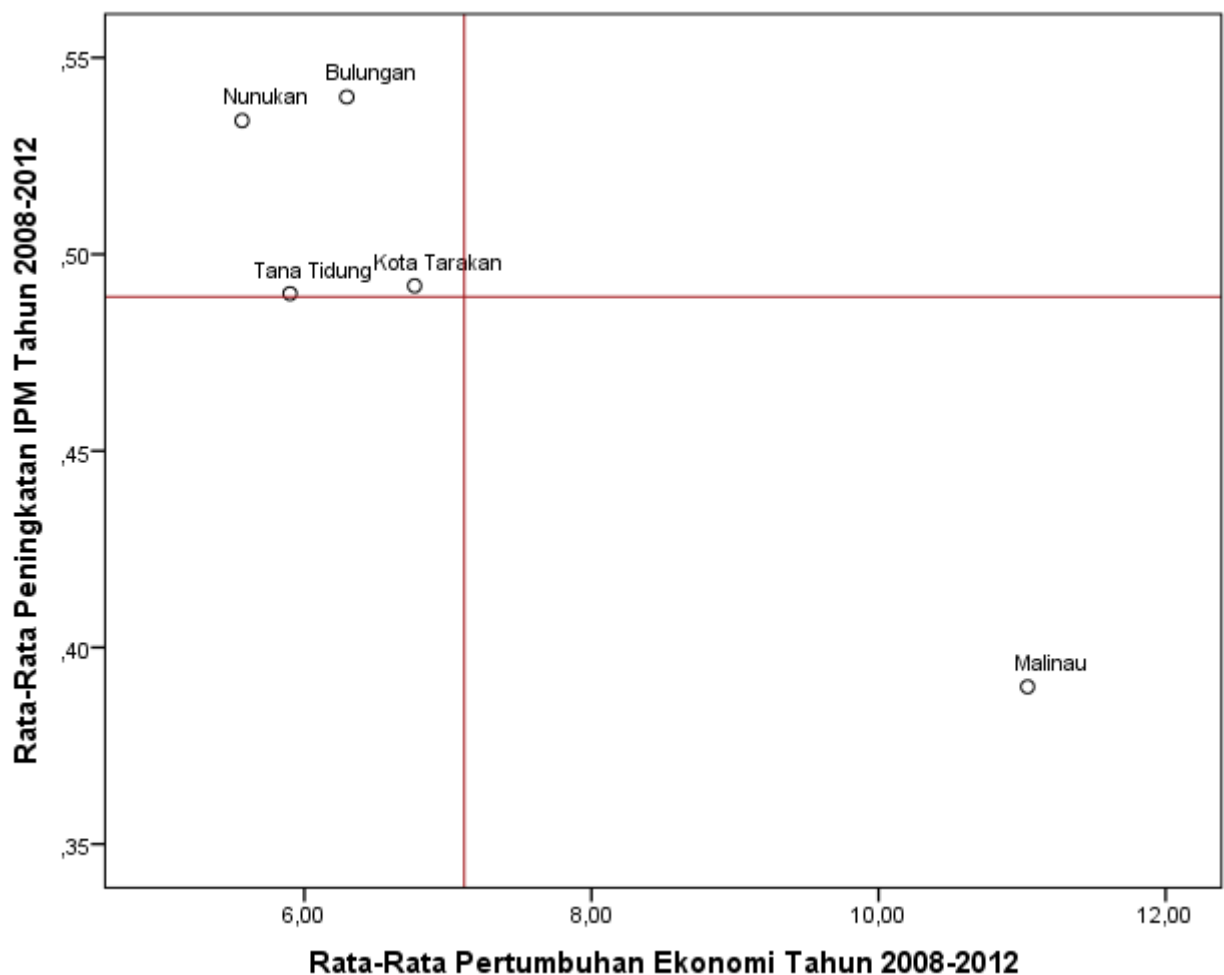
Ketiga, Kota Tarakan terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan. *Keempat*, tidak ada kabupaten dan kota yang terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*).

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012 (sebelum dan sesudah mengalami pemekaran).

Gambar 6

Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pertama, tidak ada kabupaten dan kota yang termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. *Kedua*, Kabupaten Bulungan, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Ketiga, tidak ada kabupaten dan kota yang terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). *Keempat*, Kabupaten Malinau terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

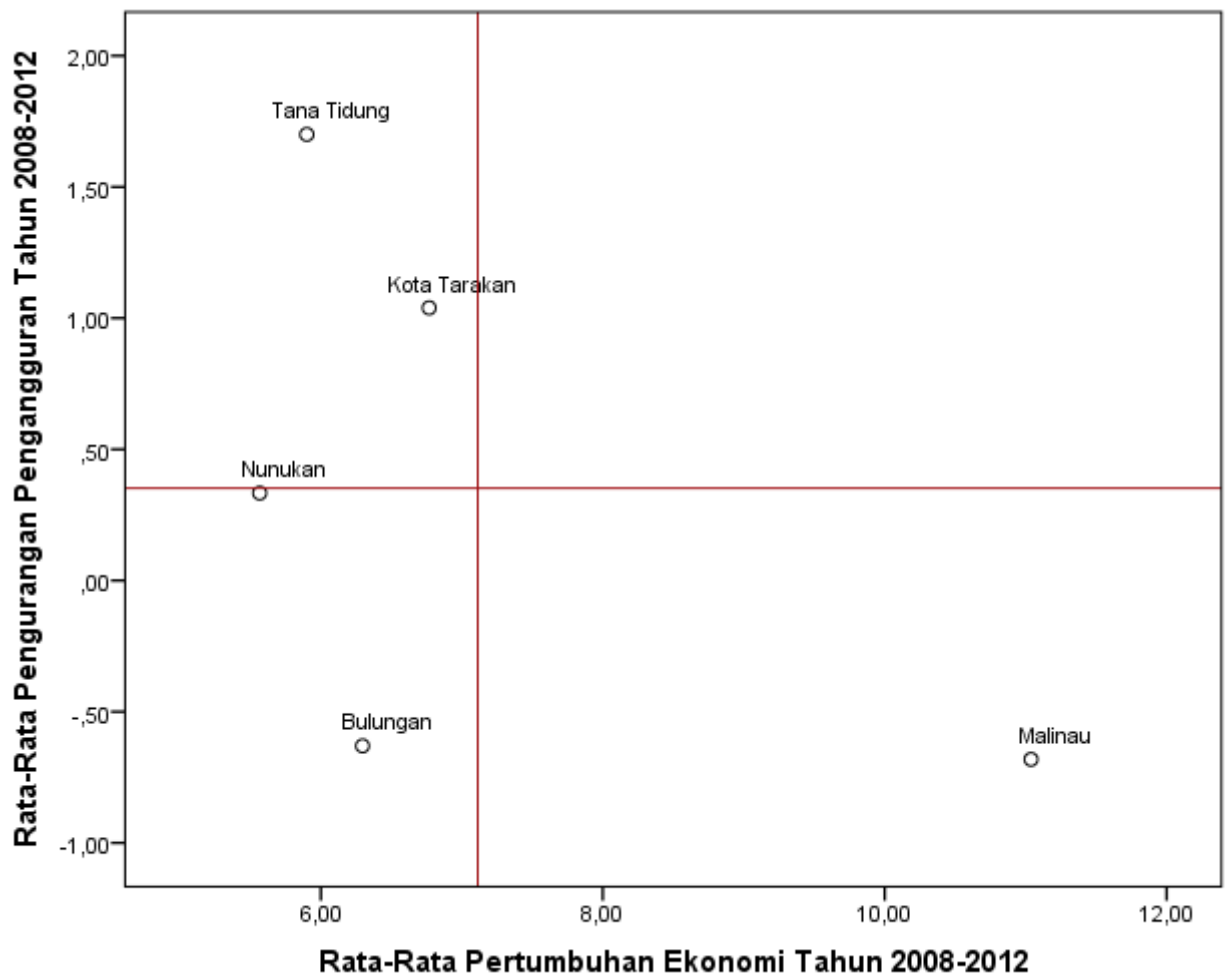
Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012 (sebelum dan sesudah mengalami pemekaran). *Pertama*, tidak ada kabupaten dan kota dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi.

Kedua, Kabupaten Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Bulungan terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Keempat, Kabupaten Malinau terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan
Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

4. Kesenjangan Ekonomi

Gambaran secara umum tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012-2013 mengacu pada kesenjangan ekonomi di provinsi induk Kalimantan Timur. Penyebab kesenjangan ekonomi di Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan adalah kesenjangan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Kabupaten Bulungan sebagai daerah ibukota Provinsi Kalimantan Utara (Tanjung Selor) memiliki infrastruktur yang belum memadai sebagai ibukota provinsi. Perbedaan tinggi rendahnya PDRB per kapita di kabupaten dan kota di Kalimantan Utara menyebabkan ketidakmerataan yang berlanjut pada kesenjangan (Tabel 1). Kesenjangan juga terjadi akibat ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap negara lain karena sulitnya memasarkan produk pertanian, perikanan, dan perkebunan seperti kelapa sawit dan kakao.

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota
di Kalimantan Utara Tahun 2007-2012 (000/jiwa)

Kab/ Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Malinau	19.423	23.189	26.215	32.057	40.282	40.559
Bulungan	19.884	21.446	21.794	22.563	23.197	28.166
Nunukan	-	-	21.359	23.055	25.289	25.667
Tana Tidung	16.623	20.343	18.461	30.355	25.902	26.997
Kota Tarakan	24.446	29.782	32.358	35.358	39.657	43.231

Sumber: BPS, 2013

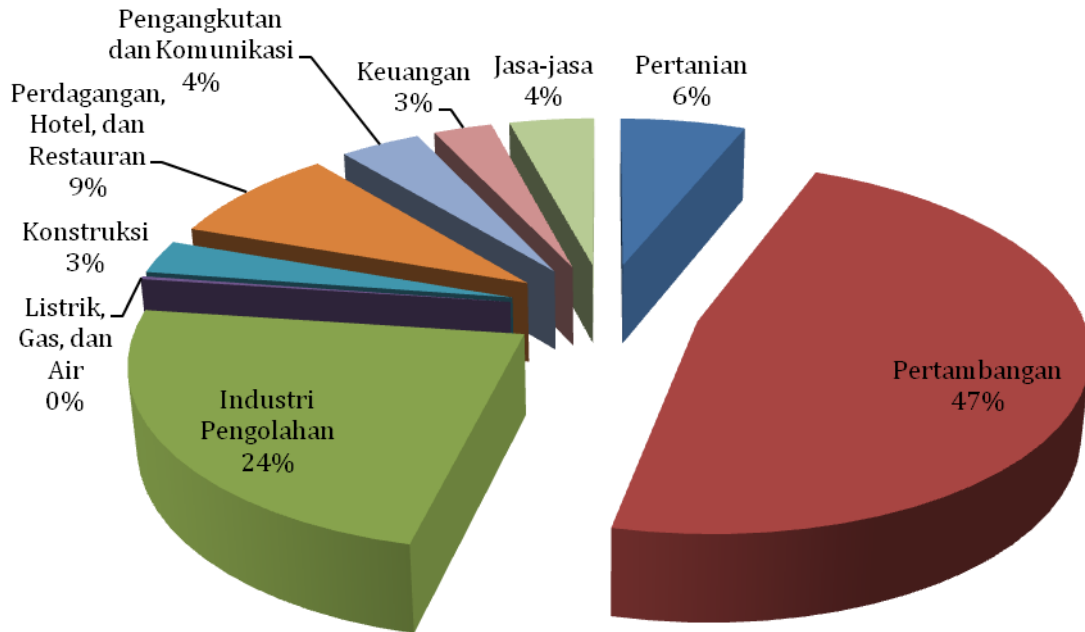
C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Ketergantungan pada Sektor Primer (Pertambangan)

Sektor pertambangan dan penggalian memegang peran terbesar dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Utara dengan kontribusi sebesar 47,44 persen (Gambar 8). Sektor industri pengolahan yang juga berkontribusi tinggi terhadap perekonomian Kalimantan Utara didukung keberadaan sumberdaya mineral di Kabupaten Nunukan walaupun pertumbuhannya tidak signifikan. Sektor pertanian berpotensi untuk dikembangkan dengan melimpahnya sumberdaya alam yang menjadi unggulan daerah, di antaranya potensi hutan tropis di Kabupaten Malinau dan Nunukan; potensi hasil laut dan tambak berupa ikan, udang, dan budidaya rumput laut; potensi pertanian berupa padi, jagung, dan kedelai; serta tanaman perkebunan meliputi kelapa sawit, kakao, dan kopi. Di Kabupaten Bulungan terdapat kawasan pertanian terpadu (*Delta Kayan Food Estate*) dengan luas lahan 50 ribu hektar.

Pengembangan sektor industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Utara dalam mengolah produk pertanian penting dilakukan karena sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan dibandingkan permintaan produk manufaktur yang lebih elastis terhadap peningkatan pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, dan ketika situasi ekonomi telah membaik serta pendapatan masyarakat telah meningkat, permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Selain itu, sektor industri pengolahan sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah dan mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), serta menciptakan lapangan kerja.

Gambar 8
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012



Sumber: Kalimantan Utara dalam Angka, 2013

2. Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara adalah ekspor dan impor (mengikuti Provinsi Kalimantan Timur), terkait dengan keberadaan sumber daya alam minyak dan gas bumi di provinsi ini. Peranan ekspor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sangat tinggi dan dominan. Nilai ekspor dan impor yang tinggi mengindikasikan aktivitas investasi lebih banyak berasal dari luar daerah, sedangkan investasi domestik relatif belum berkembang. Tabel 2 menunjukkan besarnya nilai ekspor dan impor Provinsi Kalimantan Utara tahun 2012. Ke depan perlu didorong peningkatan investasi untuk menjamin pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Pertumbuhan tinggi memerlukan penambahan stok kapital untuk menunjang produksi di sektor riil.

Tabel 2
Nilai Ekspor dan Impor Tahun 2012

Pelabuhan	Nilai Ekspor (Ribu USD)	Nilai Impor (Ribu USD)
Lintas Tarakan	392.078	68.381
Nunukan	101.195	2.621
Tanjung Selor	318.335	137
Total	811.608	71.139

Sumber: Kalimantan Utara dalam Angka, 2013

Pertumbuhan ekonomi yang terlalu bertumpu pada ekspor sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dunia. Kontraksi sektor-sektor yang berorientasi ekspor berpotensi diikuti pengurangan tenaga kerja yang dapat berakibat pada meningkatnya pengangguran di daerah. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong terciptanya keseimbangan sumber-sumber pertumbuhan khususnya dengan meningkatkan peran investasi (pembentukan modal tetap bruto) dalam perekonomian daerah.

Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu ditingkatkan adalah iklim usaha di daerah. Iklim usaha yang kondusif bagi investasi terbentuk dari kualitas regulasi yang konsisten, perpajakan yang transparan dan tidak tumpang tindih, pelayanan perijinan yang efisien, dan kelembagaan penyelesaian konflik yang efektif. Langkah penting dalam perbaikan pelayanan perijinan adalah pelaksanaan dan penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara sungguh-sungguh dan konsisten. Dalam hal ini, semua kabupaten/kota di Kalimantan Utara secara formal masih menginduk pada Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan PTSP. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut adalah peningkatan efisiensi perijinan yang harus tercermin dari menurunnya biaya dan waktu yang diperlukan oleh para pelaku usaha.

3. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Optimalisasi posisi Kalimantan Utara yang dapat mendukung pengembangan wilayah Kalimantan membutuhkan dukungan prasarana perhubungan yang baik khususnya dalam memperlancar lalu lintas penduduk dan distribusi barang. Provinsi Kalimantan Utara dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 1691,27 km yang terdiri atas jalan negara sepanjang 624,49 km, jalan provinsi sepanjang 134 km, dan jalan kabupaten sepanjang 932,78 km (Tabel 3). Data kerapatan jalan yang menyatakan panjang jalan tiap km² di Kalimantan Utara masih menjadi satu dengan Kalimantan Timur sebagai provinsi induk, dengan kondisi masih berada di bawah kerapatan jalan nasional.

Tabel 3
Panjang Jalan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Panjang Jalan (km)		
	Negara	Provinsi	Kabupaten
Malinau	132,08	-	-
Bulungan	163,4	134	932,78
Nunukan	323,57	-	-
Tana Tidung	-	-	-
Kota Tarakan	5,44	-	-
Kalimantan Utara	624,49	134	932,78

Sumber: Kalimantan Utara dalam Angka, 2013

Dari segi kualitas, kondisi jalan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012 belum cukup baik dengan 68 persen jalan aspal (Tabel 4). Permasalahan yang sering mengemuka yaitu kerusakan jalan. Hal ini tentu menjadi penghambat peningkatan produktivitas sektor pertanian dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi pengembangan industri lokal. Tantangan yang harus diatasi adalah peningkatan kualitas jaringan jalan di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 4
Panjang Jalan Nasional Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Kalimantan Utara	424	68	178	28	23	4	0	0	625	100
Kalimantan	4.660	81	615	11	429	8	23		5.727	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

Sumber: : BPS (2013), Kalimantan Utara dalam Angka (2013)

Infrastruktur lain yang juga sangat penting bagi perekonomian wilayah adalah kelistrikan. Data konsumsi listrik perkapita di Kalimantan Utara masih tergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur yaitu berada di bawah rata-rata nasional sebesar 753,7 kWh. Tabel 5 menunjukkan gambaran secara umum penggunaan energi listrik di Kalimantan Utara tahun 2012

Tabel 5
Tenaga Listrik yang Terjual Tahun 2012 (MWh)

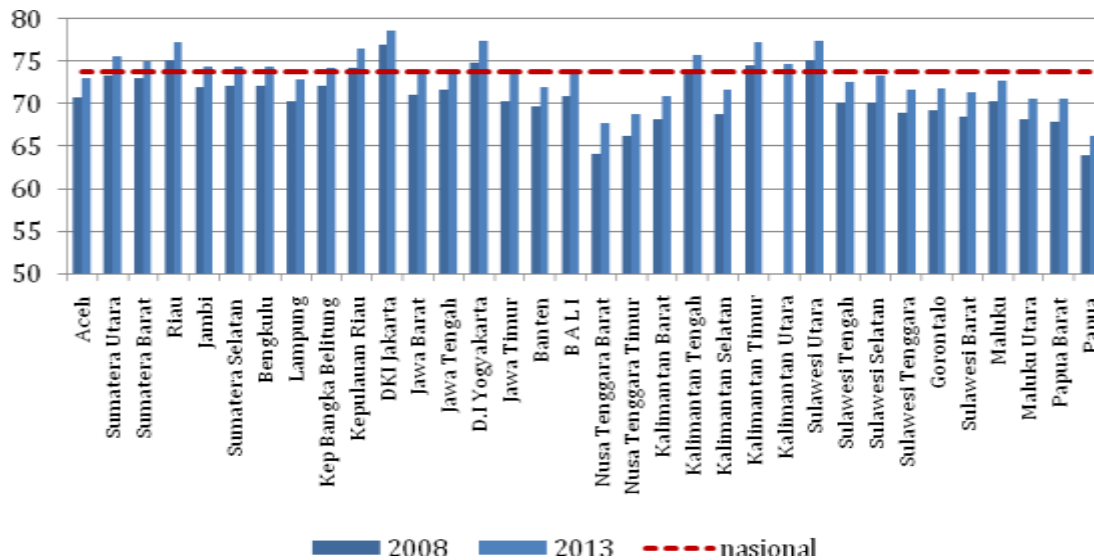
Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	Usaha	Industri	Umum
Malinau	15.400,88	4.588,68	1.047,52	6.309,13
Bulungan	29.987,84	6.781,15	2.374,14	7.243,27
Nunukan	29.085,04	9.861,24	1.122,79	6.748,38
Tana Tidung	1.493,66	1.044,34	-	402,51
Tarakan	84.230,00	63.886,00	-	19.913,00
Kalimantan Utara	160.197,42	86.161,41	4.544,45	40.616,29

Sumber: PT PLN (Persero) Wil. Kalimantan Timur dan PT PLN Kota Tarakan dalam Kalimantan Utara dalam Angka, 2013

4. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Kalimantan Utara relatif baik namun masih perlu ditingkatkan. Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Utara pada tahun 2013 berada di atas rata-rata nasional dengan menduduki peringkat 10 dari 34 provinsi, yaitu sebesar 74,72. Secara garis besar seluruh komponen pembentuk IPM sudah berada diatas rata-rata nasional sebesar 73,81 (Gambar 9).

Gambar 9
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

5. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Tabungan masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat turut menentukan aktivitas perekonomian. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan berkembang apabila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi.

Rasio pinjaman terhadap simpanan di Kalimantan Utaran nilainya lebih besar dari satu dan cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan terbatasnya potensi simpanan masyarakat di Kalimantan Utara, atau terdapat keterbatasan tabungan sebagai sumber modal masyarakat. Sebagai perbandingan, rasio pinjaman terhadap simpanan tahun 2012 untuk wilayah Kalimantan adalah 1,25 dan rasio untuk nasional adalah 0,92 (Tabel 6). Oleh karena itu diperlukan upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat.

Tabel 6
Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2012

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan
Kalimantan Utara	3.899	4.392	1,13
Kalimantan	173.718	217.741	1,25
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92

Sumber: BPS (2013), Bank Indonesia Cab. Samarinda dalam Kalimantan Utara dalam Angka (2013)

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Dengan potensi yang dimilikinya serta perkiraan dinamika lingkungan yang mempengaruhi, perekonomian Kalimantan Utara diperkirakan akan tumbuh positif hingga tahun 2015. Membaiknya kualitas infrastruktur diperkirakan akan diikuti meningkatnya minat investor dalam mengembangkan industri pengolahan sumber daya mineral maupun pertanian di Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya bagian Sabah dan Serawak. Letak geografis Provinsi Kalimantan Utara cukup strategis dan menguntungkan karena dilalui oleh Alur Laut Kawasan Indonesia II (ALKI II) yang sering dilalui oleh kapal asing yang berlayar ke perairan Indonesia.

Berdasarkan kinerja pembangunan selama ini dan modal pembangunan yang dimiliki, prospek pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 5,0 – 6,9 persen dapat tercapai. Di Kawasan Timur Indonesia kinerja ekonomi akan semakin membaik berkat meningkatnya produksi pertanian dan aktivitas pertambangan setelah diberlakukannya ijin ekspor mineral bagi para penambang besar. Pada tahun 2015 prospek pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia diperkirakan lebih meningkat dibandingkan tahun 2014, yaitu tumbuh pada kisaran 5,6 – 6,1 persen. Kinerja Provinsi Kalimantan Utara diperkirakan mendorong prospek yang membaik ini, didukung oleh membaiknya kinerja di sektor pertambangan dan industri pengolahan dan adanya peningkatan produktivitas kelapa sawit seiring dengan masuknya panen sawit dan mulai berproduksinya lahan baru yang dapat menahan perlambatan ekonomi Kalimantan Utara lebih lanjut.
2. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 6,7 – 4,6 persen, sedangkan pada tahun 2012 tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 11,01 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2013-2019 Provinsi Kalimantan Utara harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 6,41 poin persentase atau 0,91 poin persentase per tahun.
3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan Provinsi Kalimantan Utara akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Kalimantan Utara maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah melalui transmisi berkurangnya perdagangan komoditas ekspor.

E. Penutup

1. Isu Strategis Daerah

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas sektor pertanian
- b. Industrialisasi dan pengembangan lapangan kerja berkualitas
- c. Peningkatan investasi di daerah
- d. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan
- e. Pemerataan kualitas sumber daya manusia
- f. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha
- g. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah

2. Rekomendasi Kebijakan

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi *brand/citra* komoditas unggulan daerah;
- c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- d. Peningkatan jaringan jalan;
- e. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah;
- f. Pemerataan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan);
- g. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
- h. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.